



Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat

(*Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Tapaktuan*)

Popi Rahma Zanni¹, Rimal Mahdani², Dara Angreka Soufyan³, Linda Rahmazaniati⁴, Dewi Sartika⁵

Universitas Teuku Umar, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: popirahmazanni@gmail.com, Rimalmahdani@utu.ac.id,

Dangreka@utu.ac.id, lindarahmazaniati@utu.ac.id, dewisartika@utu.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 26 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of transparency and accountability in tax management on public trust in the Tapaktuan Pratama Tax Office. This study used quantitative methods. The sample size for this study was 100 respondents. Data were collected through questionnaires distributed to taxpayers registered at the Tapaktuan Pratama Tax Office (KPP Pratama). The data analysis technique used was multiple linear regression analysis using SPSS version 26. The results of the study indicate that transparency influences public trust, accountability influences public trust, and transparency and accountability simultaneously influence public trust. This indicates that the higher the level of transparency and accountability in tax management, the higher the level of public trust in the Tapaktuan Pratama Tax Office.

Keywords: Transparency, Accountability, Public trust.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tapaktuan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tapaktuan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, serta secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPP Pratama Tapaktuan.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Kepercayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi di mana suatu kelompok atau komunitas memiliki taraf hidup yang layak. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tersebut diperlukannya dukungan dari berbagai sektor, salah satunya yaitu dari sektor pajak (Stepani et al., 2024). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang berperan penting dalam membiayai dan mendukung pembangunan nasional yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Nugroho & Kurnia, 2020). Oleh karena itu, diperlukannya keberhasilan sistem perpajakan. Keberhasilan sistem perpajakan sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu, melaporkan pajak secara jujur, serta memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara (Seran & Priyastiwi, 2023). Hal lain yang dibutuhkan dan tak kalah penting untuk mendukung keberhasilan sistem perpajakan adalah kepercayaan masyarakat (Kurniawan & Larasati, 2023).

Kepercayaan masyarakat merupakan penilaian kolektif dari suatu pihak kepada pihak lain bahwa kelompok tersebut melakukan tindakan jujur, serta memenuhi komitmennya dan tidak merugikan pihak lainnya (Sirajuddin & Arianingsi, 2020). Namun, permasalahan yang terjadi saat ini adalah tingkat kepuasan masyarakat dan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan pajak daerah semakin rendah (Centy & Adnan, 2024). Apalagi dengan adanya kasus korupsi paling fenomenal yang melibatkan oknum pengawai pajak yaitu Gayus

Tambunan yang dinyatakan terbukti menyalahgunakan wewenangnya yaitu memanipulasi pajak saat menjadi pengawai pajak (Saptohutomo, 2022). Tahun 2023, juga terjadi kasus korupsi yang melibatkan tiga pengawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang yang berinisial RFG, NWP, dan RFH yang diduga menerima suap terkait pemenuhan kewajiban pajak dari beberapa perusahaan yang membuat negara mengalami kerugian pendapatan (Yulianus, 2023). Pada tahun 2024, terjadi kasus penggelapan pajak senilai Rp 5,25 miliar oleh oknum AF yang diserahkan langsung oleh DJP kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Gumiwang, 2024). Dan pada tahun 2025, terjadi kasus terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kementerian keuangan (Fadilah, 2025). Fenomena-fenomena tersebut semakin membuat kepercayaan masyarakat menurun terhadap institusi pajak.

Fenomena menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat juga terjadi pada KPP Pratama Tapakatuan. Hal ini dinyatakan langsung oleh beberapa wajib pajak dan pihak KPP pada saat observasi awal, yang tercermin dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pajak, menurunnya partisipasi wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak, dan banyaknya kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang terjadi di beberapa kantor pelayanan pajak di Indonesia seperti yang dipaparkan diatas. Pernyataan dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pajak bisa dilihat pada Tabel 1.dibawah ini.

Tabel 1.

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Pajak di KPP Pratama Tapaktuan

Tahun	Jumlah kegiatan sosialisasi	Jumlah pajak diundang	wajib yang	Jumlah wajib pajak yang hadir	Percentase kehadiran (%)
2020	7	400	136		34%
2021	11	550	180		32,7%
2022	13	650	214		32,9%
2023	6	300	192		64%
2024	6	300	117		39%

Pada Tabel 1. terlihat adanya penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pajak dari tahun 2023 dan 2024. Salah satu penyebab kepercayaan masyarakat menurun dikarenakan masih banyaknya kasus-kasus perpajakan yang terjadi pada tahun-tahun tersebut sehingga menurunkan tingkat kepercayaan publik. Oleh karena itu, dalam pengelolaan pajak sangat diperlukannya transparansi dan akuntabilitas untuk mendapat kepercayaan masyarakat.

Transparansi merupakan keterbukaan (openness) organisasi, perusahaan, dan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Sukmawati & Nurfitriani, 2019). Transparansi dalam konteks pengelolaan pajak mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam menyajikan informasi tentang kebijakan, pengumpulan dan penggunaan pajak yang diterima dari masyarakat (Islami et al., 2024). Transparansi pajak juga menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam mendukung kepatuhan pembayaran pajak dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (Putri & Andi, 2020). Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah melalui penyediaan informasi yang memadai dan akurat (Idris, 2020). Dalam pengelolaan perpajakan hal ini berguna untuk mengetahui dan mengawasi bagaimana pajak digunakan. Oleh karena itu, transparansi disetiap elemen pemerintahan terutama dalam pengelolaan pajak sangat penting agar tidak terjadinya kecurangan-kecurangan. Hal ini di dukung oleh penelitian Abarang et al., (2025), Nurhaliza dan Marlina (2024), Djafar et al., (2024), dan Nurrizkiana et al., (2017), yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak yang bertindak sebagai pelaksana (agent) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (principal) (Mardiasmo, 2018). Dalam konteks institusi pajak, akuntabilitas berarti bahwa lembaga tersebut harus bertanggungjawab atas semua proses, kebijakan, dan penggunaan dana yang mereka kelola agar masyarakat yakin dan percaya bahwa pajak yang dibayar digunakan dan di kelola secara benar (Centy & Adnan, 2024). Untuk menerapkan akuntabilitas pada institusi pajak maka institusi pajak harus membuat laporan rutin, harus terbuka terhadap pengawasan oleh lembaga eksternal, institusi pajak harus menerima masukan dari

masyarakat, dan institusi pajak harus memastikan pegawainya memiliki kemampuan dan pemahaman yang baik mengenai akuntabilitas (Ikbal, 2021). Akuntabilitas disini tidak hanya berperan sebagai pemenuhan kewajiban, namun akuntabilitas dapat menjadi media untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (Imawan et al., 2019). Hal ini juga didukung oleh penelitian Prihatin dan Mustaqim (2023), Hastuti dan Prabowo (2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas memiliki peran krusial dalam pengelolaan pajak untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Seperti penelitian Muhammam (2023), Basri (2022), dan Oktavia (2020) yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dari fenomena diatas menarik penulis untuk menguji kembali tentang transparansi dan akuntabilitas, mengingat pentingnya peran transparansi dan akuntabilitas dalam membangun kepercayaan masyarakat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana kedua faktor tersebut berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat diwilayah kerja KPP Pratama Tapaktuan, dengan mengetahui faktor yang berpengaruh, KPP Pratama Tapaktuan bisa memperbaiki atau meningkatkan strategi komunikasi, pelayanan, dan pelaporan agar lebih terbuka supaya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga berdampak pada meningkatnya kepatuhan dan penerimaan pajak diwilayah Tapaktuan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, masih terdapat kesenjangan hasil penelitian yang belum konsisten mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat. Di mana, penelitian seperti yang dilakukan Taufiqi dan Ariani (2022), Latif (2020), dan Apriliana (2019) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Demikian pula, penelitian Wirawan (2023) serta Sofyan dan Tahar (2021) menemukan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Bahkan, studi oleh Azizah dan Kholifah (2023) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan publik. Temuan-temuan negatif tersebut sangat berbeda dengan hasil penelitian lain seperti Abarang et al., (2025) dan Djafar et al., (2024) yang justru menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan. Adanya ketidaksesuaian hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kepercayaan kemungkinan besar tidak bersifat umum, melainkan dipengaruhi oleh faktor kontekstual yang berbeda di setiap lokasi penelitian. Di mana sebagian besar penelitian terdahulu cenderung dilakukan di wilayah yang relatif lebih maju atau di pusat perkotaan.

Kesenjangan inilah yang coba diisi oleh penelitian ini. Penelitian ini mengambil lokasi studi di wilayah kerja KPP Pratama Tapaktuan, yang secara kontekstual memiliki karakteristik unik yang di mana Aceh Selatan merupakan daerah pesisir dan agraris. Karakteristik geografis dan sosial ekonomi ini berpotensi memunculkan tantangan yang berbeda dalam hal penyampaian layanan dan

diseminasi informasi perpajakan. Persepsi masyarakat terhadap transparansi (keterbukaan akses informasi) dan akuntabilitas (pertanggungjawaban kinerja) di wilayah dengan tantangan akses fisik dan digital mungkin berbeda secara signifikan dibandingkan dengan masyarakat di wilayah yang lebih maju. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menguji apakah model yang ada tetap valid di konteks daerah yang berbeda.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Oktavia (2020) yang meneliti pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi kabupaten seluma. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian terdahulu meneliti pengaruh transparansi dan akuntabilitas dalam konteks dana desa sedangkan penelitian ini meneliti pengaruh transparansi dan akuntabilitas dalam konteks pengelolaan pajak.

Berdasarkan uraian permasalahan dan kesenjangan dari penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk menguji kembali penelitian dengan judul "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Tapaktuan)".

METODE

Desain penelitian merupakan serangkaian prosedur dalam rangka mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menstrukturkan atau menjawab permasalahan penelitian (Malhotra, 2017). Dalam suatu penelitian, penelitian harus melakukan metode yang akan digunakan dalam penelitiannya. Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dapat dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan megantisipasi masalah.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mencari hubungan variabel satu dengan variabel lainnya, dan untuk memperoleh tujuan menjawab rumusan masalah dari hipotesis awal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan pajak (studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tapaktuan). Setting penelitian merupakan tempat (lokasi) yang direncanakan untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Tapaktuan.

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian dalam suatu wilayah. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi (Arikunto, 2017). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tapaktuan yang berjumlah 96.600

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini sampel ditentukan melalui metode random sampling. Menurut Sumargo (2020) random sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel dari populasi sedemikian rupa, sehingga setiap elemen populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Untuk meneliti populasi besar, perlu ditentukan jumlah sampel yang tepat. Salah

satu cara mudah untuk menghitung populasi dengan menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin adalah formula untuk menghitung jumlah sampel minimal jika perilaku sebuah populasi belum diketahui secara pasti. Besaran sampel penelitian dengan rumus Slovin ditentukan lewat nilai tingkat kesalahan yang digunakan, maka semakin kecil jumlah sampel yang diambil. Jadi, sampel pada penelitian ini adalah 99,8 dibulatkan menjadi 100 orang.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2019). Data primer yang didapatkan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara membagikan kuesioner kepada objek yang di teliti. Kuesioner yang dipakai dikutip dari contoh penelitian Basri (2022), dan Oktavia (2020).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner. Kuesioner digunakan untuk mengetahui tanggapan responden terkait dengan permasalahan, untuk mengukur data yang dianalisis melalui kuesioner setiap responden diminta untuk menjawab pertanyaan dengan setiap jawaban per item menggunakan skala likert dengan pilihan jawaban dari sangat positif sampai sangat negatif, dengan jawaban tersebut dapat diberi skor dari 1 sampai 5, untuk skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Sugiyono (2019) mendefinisikan skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan presepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena dalam kehidupan sosial.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Metode regresi linear berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam suatu model prediktif tunggal, yang memperlihatkan hubungan antara satu variabel terkait (dependent variable) dengan beberapa variabel bebas (independent variables) (Ghozali, 2016). Data yang diperoleh melalui data primer yaitu menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Adapun alat analisis data jawaban dari responden yang digunakan pada penelitian ini adalah SPSS 26. SPSS 26 merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis data dan menghasilkan output yang lebih akurat. Uji instrumen dilakukan dengan uji validitas, uji reliabilitas. Uji asumsi klasik dilakukan dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Kemudian analisis regresi linear berganda. Serta uji hipotesis dilakukan dengan uji t, uji f, dan uji koefisien

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yaitu:

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Item pertanyaan	Nilai r Hitung (Person Correlation)	Nilai r Tabel	Signifikansi	Keterangan
Kepercayaan Masyarakat (Y)				
Y.1	0,597	0,195	0,000	Valid
Y.2	0,547	0,195	0,000	Valid
Y.3	0,603	0,195	0,000	Valid
Y.4	0,664	0,195	0,000	Valid

Y.5	0.590	0,195	0.000	Valid
Y.6	0.629	0,195	0.000	Valid
Y.7	0.634	0,195	0.000	Valid
Y.8	0.693	0,195	0.000	Valid
Y.9	0.619	0,195	0.000	Valid
Y.10	0.601	0,195	0.000	Valid
Y.11	0.551	0,195	0.000	Valid
Transparansi (X_1)				
X _{1.1}	0.589	0,195	0.000	Valid
X _{1.2}	0.767	0,195	0.000	Valid
X _{1.3}	0.720	0,195	0.000	Valid
X _{1.4}	0.640	0,195	0.000	Valid
X _{1.5}	0.825	0,195	0.000	Valid
X _{1.6}	0.843	0,195	0.000	Valid
X _{1.7}	0.791	0,195	0.000	Valid
X _{1.8}	0.788	0,195	0.000	Valid
Akuntabilitas (X_2)				
X _{2.1}	0.672	0,195	0.000	Valid
X _{2.2}	0.804	0,195	0.000	Valid
X _{2.3}	0.827	0,195	0.000	Valid
X _{2.4}	0.814	0,195	0.000	Valid
X _{2.5}	0.828	0,195	0.000	Valid
X _{2.6}	0.776	0,195	0.000	Valid
X _{2.7}	0.820	0,195	0.000	Valid
X _{2.8}	0.860	0,195	0.000	Valid
X _{2.9}	0.761	0,195	0.000	Valid
X _{2.10}	0.724	0,195	0.000	Valid

Berdasarkan Tabel 2. di atas menunjukkan bahwa seluruh item memiliki nilai rhitung > nilai r tabel dengan nilai signifikansi < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh butir-butir pertanyaan atau pernyataan yang ada dalam kuesioner dinyatakan valid dan telah memenuhi uji validitas.

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	N of items	Cronbach Alpha	Keterangan
Kepercayaan Masyarakat (Y)	11	0.932	Reliabel
Transparansi (X_1)	8	0.889	Reliabel
Akuntabilitas (X_2)	10	0.932	Reliabel

Berdasarkan Tabel 3. di atas menunjukkan bahwa Cronbach Alpha variabel kepercayaan masyarakat (Y) sebesar 0,932, transparansi (X_1) sebesar 0,889, dan

akuntabilitas (X_2) sebesar 0,932. Hal ini menunjukkan bahwa semua Cronbach Alpha dari variabel X_1 , X_2 , $Y > 0,60$ maka dapat dikatakan reliabel.

Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	6.44932126
Most Extreme Differences	Absolute	.107
	Positive	.107
	Negative	-.106
Test Statistic		.107
Asymp. Sig. (2-tailed)		.075 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Berdasarkan Tabel 4. di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengujian sebesar $0,075 > 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data pada variabel terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Multikolinearitas

Coefficients		Collinearity Statistics	
	Model	Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Transparansi (X_1)	0.977	1.024
	Akuntabilitas (X_2)	0.977	1.024
a. Dependent Variable : Kepercayaan Masyarakat			

Berdasarkan Tabel 5. di atas menunjukkan bahwa nilai Tolerance $> 0,10$, yang di mana variabel transparansi (X_1) sebesar 0,977 dan variabel akuntabilitas (X_2) sebesar 0,977. Kemudian bisa juga dilakukan dengan cara nilai VIF $< 10,00$ pada variabel transparansi (X_1) sebesar 1,024 dan variabel akuntabilitas (X_2) sebesar 1,024. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut menunjukkan tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a		Unstandardized Coefficients			
	Model	B	Standardized Coefficients	T	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		

1	(Constant)	0.565	4.132	0.137	0.892
	Transparansi (X_1)	0.113	0.099	0.116	0.258
	Akuntabilitas (X_2)	0.027	0.071	0.039	0.703

a. Dependent Variable: Abs_RES

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan metode glejser pada Tabel 6. di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel transparansi (X_1) sebesar 0,258 dan variabel akuntabilitas (X_2) sebesar 0,703. Dapat dilihat bahwa variabel transparansi dan akuntabilitas memiliki tingkat signifikan $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Liniear Berganda

Tabel 7
. Hasil Analisis Liniear Berganda

<i>Coefficients^a</i>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	
Model		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	43.593	9.047		
	Transparansi (X_1)	0.641	0.117	0.419	
	Akuntabilitas (X_2)	0.374	0.105	0.349	
a. Dependent Variable: Kepercayaan Masyarakat					

Berdasarkan Tabel 7. menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel, sehingga persamaan regresi linear berganda dapat disusun sebagai berikut : 1). Nilai konstanta sebesar 43.593 menunjukkan bahwa apabila variabel transparansi (X_1) dan akuntabilitas (X_2) bernilai 43.593, maka tingkat kepercayaan masyarakat (Y) tetap sebesar 43.593. 2). Nilai koefisien regresi transparansi (X_1) sebesar 0.641 menunjukkan bahwa setiap peningkatan X_1 sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Y sebesar 0.641. 3). Nilai koefisien regresi akuntabilitas (X_2) sebesar 0.374 menunjukkan bahwa setiap peningkatan X_2 sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Y sebesar 0.374.

Uji T

Tabel 8. Hasil Uji T

<i>Coefficients^a</i>		<i>Unstandardized</i>		<i>Standardized</i>	
Model		<i>Coefficients</i>		<i>Coefficients</i>	
			Std.		
		B	Error	Beta	
1	(Constant)	43.593	9.047		4.818 0.000
	Transparansi (X_1)	0.641	0.117	0.419 5.478 0.002	
	Akuntabilitas (X_2)	0.374	0.105	0.349 3.561 0.002	
a. Dependent Variable: Kepercayaan Masyarakat					

Berdasarkan tabel 8 diatas maka dapat di interpretasikan sebagai berikut : 1). Hipotesis pertama diketahui untuk variabel transparansi (X_1) terhadap kepercayaan masyarakat (Y) thitung = 5.478 > ttabel = 1,984 dan nilai signifikansi 0,002 < 0,05. Maka H01 ditolak dan Ha1 diterima, artinya terdapat pengaruh dari variabel transparansi terhadap kepercayaan masyarakat. 2). Hipotesis kedua diketahui untuk variabel Akuntabilitas (X_2) terhadap kepercayaan masyarakat (Y) thitung = 3.561 > ttabel = 1,984 dan nilai signifikansi 0,002 < 0,05. Maka H02 ditolak dan Ha2 diterima, artinya terdapat pengaruh dari variabel akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat.

Uji F

Tabel 9. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square		
				F	Sig.	
1	Regression	2112.729	2	1056.364	24.884	0.001 ^b
	Residual	4117.781	97	42.451		
	Total	6230.510	99			

a. Dependent Variable: Kepercayaan Masyarakat

Predictors: (Constant), Transparansi (X_1), Akuntabilitas (X_2)

Berdasarkan Tabel 9. menunjukkan bahwa variabel transparansi (X_1) dan akuntabilitas (X_2) dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05 atau dengan cara lain dimana jika nilai Fhitung = 24.884 > Ftabel = 3,09. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk hipotesis ketiga adalah H03 ditolak dan Ha3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi (X_1) dan akuntabilitas (X_2) berpengaruh secara simultan terhadap kepercayaan masyarakat (Y).

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary							
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate			
1	0.680 ^a	0.463	0.452	2.815			
a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas							
b. Dependent Variabel : Kepercayaan Masyarakat							

Berdasarkan Tabel 10. di atas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0.452. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat sebesar 45,2% dan sisanya 54,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak teliti.

Pengaruh Transparansi terhadap Kepercayaan Masyarakat Pengaruh Transparansi terhadap Kepercayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengujian parsial diperoleh nilai thitung > ttabel (5.478 > 1,984) dengan nilai sig 0,002 < 0,05 maka H01 ditolak dan Ha1 diterima. Artinya terdapat pengaruh transparansi terhadap kepercayaan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa responden

memiliki persepsi sangat tinggi terhadap praktik transparansi di KPP Pratama Tapaktuan.

Hasil kuesioner memperlihatkan bahwa KPP Pratama Tapaktuan telah memberikan akses informasi yang mudah terkait pengelolaan pajak, seperti informasi administrasi perpajakan yang disediakan melalui media sosial KPP. Selain itu, KPP juga mempublikasikan informasi mengenai rencana dan pengalokasian penerimaan pajak secara terbuka melalui kegiatan sosialisasi website resmi DJP, serta platform informasi KPP. Hal ini memungkinkan masyarakat memahami bagaimana dana pajak direncanakan dan dikelola.

Dalam aspek pengawasan, KPP memiliki mekanisme internal yang berfungsi memastikan bahwa seluruh informasi yang diberikan bersifat jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Monitoring juga dilakukan oleh DJP untuk menjaga konsistensi dan keakuratan penyampaian data kepada publik. KPP menyediakan informasi hukum dan regulasi perpajakan, seperti KUP, PMK, serta pedoman teknis lainnya melalui laman DJP sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum dalam menilai kinerja KPP. Masyarakat juga dilibatkan dalam penyusunan rencana dan pengelolaan pajak melalui forum sosialisasi, edukasi perpajakan, survei, dan kuesioner. Selain itu, mekanisme pengaduan seperti kotak saran, layanan pengaduan online, maupun helpdesk KPP semakin memperkuat keterlibatan publik dalam proses transparansi kebijakan pajak.

Kepercayaan masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan terhadap KPP tercermin dari meningkatnya partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, seperti pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Peningkatan ini tidak terlepas dari praktik transparansi yang dilakukan oleh KPP Pratama Tapaktuan.

Namun, temuan positif ini perlu dianalisis secara kritis dalam konteks research gap yang telah dijelaskan pada Bab I. Hasil penelitian ini secara langsung membantah temuan Taufiqi dan Ariani (2022) serta Latif (2020) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan. Pertanyaan penting kemudian muncul seperti mengapa transparansi "berhasil" meningkatkan kepercayaan di Tapaktuan tetapi "gagal" di lokasi penelitian lainnya? Terdapat dua kemungkinan penjelasan. Pertama, dari perspektif optimis, konteks lokal berperan penting. Upaya khusus KPP Pratama Tapaktuan dalam pengelolaan media sosial, sosialisasi langsung, serta komunikasi publik tampaknya lebih efektif dibandingkan wilayah lain. KPP mampu membangun reputasi lokal yang positif, sehingga persepsi wajib pajak tidak terlalu dipengaruhi oleh isu atau skandal pajak nasional.

Kedua, dari perspektif metodologis yang lebih skeptis, temuan positif ini berpotensi dipengaruhi oleh bias pengambilan sampel. Dengan populasi 96.600 wajib pajak, pemilihan 100 sampel secara acak sangat sulit dilakukan. Dokumentasi foto yang di lampiran menunjukkan bahwa pengambilan kuesioner dilakukan secara tatap muka di berbagai lokasi, mengindikasikan penggunaan non-probability sampling (kemungkinan convenience sampling). Jika hal ini benar, responden yang paling mudah dijangkau cenderung merupakan wajib pajak yang kooperatif, patuh, dan sudah memiliki persepsi positif. Karena itu, meskipun Ha1 diterima secara statistik, generalisasi temuan ini perlu dilakukan secara hati-hati dan tidak serta

merta dianggap sebagai bukti bahwa masalah kepercayaan masyarakat terhadap KPP Tapaktuan seperti ditunjukkan dalam Tabel 1.1 telah sepenuhnya terselesaikan.

Secara teoritis, temuan ini mendukung Teori Legitimasi, yang menyatakan bahwa ketika sebuah institusi secara proaktif menyediakan keterbukaan seperti akses informasi yang mudah, publikasi alokasi penerimaan, dan kejelasan regulasi maka masyarakat merespons dengan memberikan legitimasi dalam bentuk kepercayaan. Temuan ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abarang et al. (2025), Nurhaliza dan Marlina (2024), Djafar et al. (2024), dan Nurrizkiana et al., (2017), yang menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kepercayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengujian parsial diperoleh nilai t hitung > t tabel ($3,561 > 1,984$) dengan nilai $\text{sig } 0,002 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh dari akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa akuntabilitas pada KPP telah diwujudkan melalui pelibatan masyarakat, keterbukaan informasi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban yang jelas dan terdokumentasi. Pelibatan masyarakat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, konsultasi publik, serta edukasi perpajakan yang didokumentasikan secara tertulis. Pengelolaan pajak juga disampaikan secara terbuka melalui laporan resmi yang dipublikasikan pada website DJP maupun dokumen KPP, dengan bahasa yang sederhana, sistematis, dan mudah dipahami oleh masyarakat dari berbagai tingkat pendidikan. Informasi anggaran pengelolaan pajak disampaikan secara akurat, lengkap, dan tepat waktu melalui papan pengumuman kantor, website resmi DJP, maupun media sosial KPP. Tujuannya agar masyarakat dapat mengetahui alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan perpajakan. Selain itu, KPP juga menyajikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Contoh laporan pertanggungjawaban dapat berupa penyampaian realisasi penerimaan pajak bulanan dan tahunan.

Temuan ini mendukung Teori Legitimasi, di mana kesediaan KPP untuk bertanggung jawab atas kinerjanya melalui dokumentasi terbuka, pelibatan masyarakat, dan laporan pertanggungjawaban yang transparan diterima dengan baik oleh responden sehingga meningkatkan kepercayaan mereka. Hasil ini juga konsisten dengan penelitian Prihatin dan Mustaqim (2023), Hastuti dan Prabowo (2022), yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat.

Namun demikian, temuan penelitian ini juga sekaligus berbenturan dengan research gap. Hasil penelitian ini membantah temuan Wirawan (2023) serta Sofyan dan Tahar (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat, bahkan berlawanan dengan penelitian Muhamarram (2023) yang menemukan pengaruh negatif. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks. Akuntabilitas yang diukur dalam kuesioner ini lebih berfokus pada akuntabilitas procedural seperti pelaporan, dokumentasi, dan kejelasan sasaran. Ada

kemungkinan bahwa pada penelitian lain, masyarakat memandang akuntabilitas prosedural tersebut hanya sebagai formalitas birokrasi yang tidak memberikan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan. Masyarakat mungkin lebih menilai akuntabilitas substantif, seperti penegakan hukum yang adil atau konsekuensi yang jelas terhadap petugas yang berkinerja buruk.

Meskipun akuntabilitas prosedural terbukti berpengaruh positif di KPP Tapaktuan, perlu dicatat bahwa koefisien regresinya akuntabilitas (0,374) lebih rendah dibandingkan transparansi (0,641). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun signifikan secara statistik, pengaruh praktis akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat tidak sekuat pengaruh transparansi. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa untuk membangun kepercayaan yang lebih kuat, KPP tidak hanya perlunya sampaikan laporan kinerja secara formal, tetapi juga menunjukkan keadilan, konsistensi, dan integritas dalam tindakan nyata.

Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Secara Simultan Terhadap Kepercayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengujian simultan diperoleh nilai fhitung $> f_{tabel}$ (24.884 $> 3,09$) dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, artinya bahwa transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Temuan ini merupakan inti dari prinsip good governance, di mana keterbukaan informasi (transparansi) harus berjalan berdampingan dengan pertanggungjawaban yang jelas (akuntabilitas) untuk membangun kepercayaan publik yang kokoh. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Djafar et al. (2024) dan Muhamarram (2023) yang menemukan bahwa kedua variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat.

Transparansi di KPP Pratama Tapaktuan terlihat dari keterbukaan informasi mengenai penerimaan pajak, rencana pengalokasian dana, serta proses pelayanan yang disampaikan secara jelas. Sementara itu, akuntabilitas tercermin dari mekanisme pertanggungjawaban tertulis dan terdokumentasi, pelaporan realisasi penerimaan pajak secara berkala, serta pengawasan internal maupun eksternal terhadap kualitas informasi yang disampaikan. Ketika kedua prinsip ini berjalan beriringan, masyarakat memperoleh keyakinan bahwa pajak yang mereka bayarkan dikelola dengan baik dan sesuai ketentuan.

Namun demikian, temuan simultan ini harus dianalisis lebih dalam melalui nilai Adjusted R Square yang diperoleh sebesar 0,452. Nilai ini memiliki makna ganda. Di satu sisi, transparansi dan akuntabilitas mampu menjelaskan 45,2% variasi kepercayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian valid dan kedua variabel tersebut memainkan peran yang signifikan. Akan tetapi, di sisi lain, nilai ini mengungkap bahwa 54,8% variasi kepercayaan masyarakat dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam model ini. Inilah temuan penting yang dapat menjelaskan paradoks antara fenomena empiris di Bab I dan hasil statistik di Bab IV.

Interpretasi ini menyiratkan bahwa meskipun responden menilai KPP Tapaktuan sudah cukup transparan dan akuntabel melalui kontribusinya terhadap kepercayaan mencapai 45,2% tetapi permasalahan seperti rendahnya partisipasi, fluktuasi kepatuhan, serta resistensi akibat skandal pajak nasional kemungkinan

masih terjadi karena dipengaruhi oleh faktor lain yang lebih substantif. Oleh karena itu, temuan ini menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas prosedural saja belum cukup untuk mengatasi seluruh persoalan kepercayaan publik. Untuk meningkatkan kepercayaan secara lebih komprehensif, KPP Pratama Tapaktuan perlu memperhatikan faktor-faktor substantif lain yang berkontribusi sebesar 54,8% variasi kepercayaan masyarakat tersebut.

SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas berdasarkan data yang telah diperoleh dari penelitian sebagaimana telah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1). Transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin terbuka dan jelas informasi terkait pengelolaan pajak yang diberikan oleh KPP Pratama Tapaktuan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. 2). Akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Artinya, KPP Pratama Tapaktuan mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan pajak secara baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka masyarakat akan semakin percaya terhadap kinerja lembaga perpajakan. 3). Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap kepercayaan masyarakat. Hal ini berarti bahwa kombinasi antara keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang baik dalam pengelolaan pajak merupakan faktor penting yang mampu meningkatkan legitimasi serta memperkuat kepercayaan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abarang, C. V., Pakaya, L., dan Panigoro, N. 2025. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Masyarakat dalam Pengelolaan APBDesa. YUMA: Journal of Management 8(2), 696-707.
- Apriliana, I. 2019. Determinan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat. Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan, 2(2).
- Arikunto. S. 2017. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung: Grahalmu.
- Azizah, D. N., dan Kholidah, E. 2023. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsivitas dalam Pengelolaan APBDes terhadap Kepercayaan Publik. Pubmedia Social Sciences And Humanities, 1(2).
- Basri, I 2022. Good Governance Akuntansi Dana Desa dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Wiwitan Timur) (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Palopo).
- Centy, F., dan Adnan, M. F. 2024. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Pengelolaan Pajak Daerah di Kota Padang. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(2). <https://news.detik.com/berita/d-7793404/kpk-panggil-3-saksi-usut-kasus-gratifikasi-di-ditjen-pajak-perkara-baru>.
- Ghozali, H. 2016. Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program SPSS, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ghozali, I. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang
- Gumiwang, R. 2024. "DJP Serahkan Tersangka Penggelapan Pajak Rp 5,25 Miliar ke Kejari Banjar". Redaksi DDTCTNews. Diakses 31 Mei 2025. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/180652/djp-serahkan-tersangka-penggelapan-pajak-rp525-miliar-ke-kejari-banjar>.
- Hastuti, D. N., dan Prabowo, T. J. W. 2022. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas Keuangan Dan Pesepsi Korupsi Terhadap Kepuasan Dan Kepercayaan Publik.(Doctoral dissertation, UNDIP: Fakultas Ekonomi dan Bisnis).
- Idris, H. 2020. Transparansi Informasi Meningkatkan Level Kepercayaan terhadap Laporan Kinerja Pemerintah. Bata Ilyas Journal Of Accounting, 1(1).
- Ikbal, M. 2021. Pengaruh remunerasi, budaya organisasi, dan pengendalian internal terhadap kinerja pegawai pajak (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Jakarta).
- Imawan, A., Irianto, G., dan Prihatiningtias, Y. W. 2019. Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 10(1), 156-175.
- Islami, P. M., Askandar, N. S., dan Fakhriyyah, D. D. 2024. Transparansi Anggaran Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 13(01), 692-700. **Orang Pribadi (Studi Kasus terhadap Mahasiswa dan Alumni Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma)** (Doctoral Dissertation, Kodeuniversitas041060#UniversitasBuddhiDharma).
- Lathif, N. H. 2020. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepercayaan Muzzaki pada BAZNAS Kabupaten Jember (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
- Malhotra, N.K. 2017. Marketing Research an Applied Orientation (7 th ed.). Chennai: Pearson India Education Services.
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Muharram, A. I. 2023. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Koperasi terhadap Tingkat Kepercayaan Anggota Koperasi. Journal Economina, 2(12), 3787-3797.
- Nugroho, V. Q., dan Kurnia, K. 2020. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 9(1).
- Nurhaliza, S., dan Marlina, L. 2024. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya). Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(4), 9157-9169.
- Nurrizkiana, B., Handayani, L., dan Widiastuty, E. 2017. Determinan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. Jurnal Akuntansi Dan Investasi, 18(1).

- Oktavia, N. 2020. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).
- Prihatin, M., dan Mustaqim, F. 2023. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah Desa Lahumoko Kabupaten Buton Utara. *Entries*, 5(1), 18-36.
- Putri, W. E., dan Andi, A. 2020. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat. *Indonesia Journal of Accounting and Business*, 1(2), 80-92.
- Saptohutomo, A. P. 2022, April 11. Kisah Gayus Tambunan Si Mafia Pajak, Rekening Fantastis dan Kenangan Rambut Palsu Halaman all - Kompas.com.KOMPAS.com.<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/12/06030041/kisah-gayus-tambunan-si-mafia-pajak-rekening-fantastis-dan-kenangan-rambut?page=all>
- Seran, A. H., dan Priyastiwi, P. 2023. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pengetuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(4), 1419-1440.
- Sirajuddin, S. M., dan Atrianingsih, A. 2020. Kepercayaan Public (Public Trust) Terhadap E-Government : Studi Kasus Penggunaan E-Mobile BPJS Kesehatan Di Kota Makassar. *Public (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(1). <Https://Doi.Org/10.31310.3131/Pjia 9.1.80-88.2020>.
- Sofyan, H., dan Tahar, A. 2021. Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademis Akuntansi*, 4(1).
- Stepani, G., Hartika, D., Balqis, S., dan Batu, D. P. L. 2024. Analisis Dampak Pajak Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 222612-22618.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52-66.
- Taufiqi, D., dan Ariani, K. R. 2022. The effect of good governance, accountability, and transparency of village funds on public trust. *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 3, 184-191.
- Wirawan, R. F., dan Yaya, R. 2024. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Keadilan terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Desa: Apakah Kepuasan Masyarakat Memediasi?. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 8(1), 87-104.
- Yulianus, J. 2023. "Badai Korupsi Sektor Pajak Yang Tidak Ada Habisnya". *Kompas*. Id. Diakses 31 Mei 2025. <https://pajak.Go.id/berita/tersangka-penggelapan-pajak-ditahan-di-rutan-bareskrim-polri>.